GRAND TEORI POLITIK NEGARAWAN\*)

OLEH:

DRS. ZUMRI BESTADO SJAMSUAR, M.Hum

Aristoteleslah yang pertama-tama menyatakan bahwa manusia itu mahluk politik atau *zoon politico*. Politik selalu berhubungan dengan *polis* dalam konteks Yunani purba. Polis adalah suatu negara, kota. Polis ini juga terkait dengan *policy* atau kebijakan dan kebijakan itu adalah mengandung unsur politis. Akan tetapi dalam kebijakan sesungguhnya tidak hanya unsur politis yang dikandungnya tetapi juga *wisdom* atau kebijaksanaan sesuatu yang sering diabaikan dan dilupakan dalam politik.

 Unsur politik adalah kepentingan dan unsur *wisdom* atau kebijaksanaan adalah nilai. Bila orang mengabaikan unsur ini dalam kepentingan, maka politikpun akan dipahami dan dijalankan dengan kaca mata kuda, dan terperangkap dalam kepentingan saja, sehingga muncul *adagium*, tidak ada kawan atau atau lawan yang abadi dalam politik, yang ada hanya kepentingan yang abadi. Pernyataan yang demikian itu adalah faham politik oartisan yang terasing dalam nilai, bukan politik Negarawan yang menyatukan politik dan nilai. Hal ini harus disadari betul bagi orang-orang yang berhasrat menjadi pengelola Negara.

 Manusia Yunani purba itu mengelola polis dalam upaya mereka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini. Dalam *polis* ini orang-orang merdeka mengelola polis itu dengan cara-cara demokrasi, walaupun saat itu masyarakat yunani purba masih terbagi menjadi kelompok orang-orang merdeka dan kelompok budak serta adanya diskriminasi *gender* yakni tidak ada hak pilih bagi wanita dan akibatnya wanita tidak dapat menjadi anggota senat. Akan tetapi, disitu sudah terlihat bahwa manusia itu pusat kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang diresapi hasrat untuk berkuasa.

 Politikpun merupakan upaya manusia untuk mewujudkan dan memenuhi kepentingan dan nilai-nilai melalui kekuasaan bagi kehidupan bersama. Dalam kehidupan sekarang ini salah satu instrumen pendukung utamanya adalah politik. Oleh karena itu pada tingkat negara politik itu pun dapat pula difahami sebagai suatu upaya mengelola negara dan sumber daya negara dengan menggunakan kekuasaaan yang sah melalui program. Program dan kebijakan-kebijakan yang semestinya didasarkan pada keadilan demi terwujudnya kesejahteraan dan kemajuan rakyat, bangsa dan negara itu sendiri. Dengan keadilan, kesejahteraan dan kemajuan yang dicapai tidak ada pengeksploitasian suatu kelompok sosial oleh kelompok sosial yang lain dalam negara itu dan sekaligus tidak akan muncul pengeksploitasian suatu negara atas negara lainnya.

\*) disampaikan pada pendidikan dan pelatihan instruktur perkaderan (TOT) Partai GOLKAR Provinsi Kalimantan Barat, Gedung Zamrud Khatulistiwa 12-13 Mei 2011

Di antara kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai itulah yang merupakan basis Grand Theory-theory Politik, dan padanya akan mengalir dan muncul teori-teori politik. Fokus utama pada kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai adalah sumber daya ekonomi dan kekusaan dengan sumber daya manusia melalui partai politik sebagai salah satu penopangnya yang tercermin dalam aspirasi-aspirasi. Dalam teori hierarki nilai Toynbee, ekonomi dan kekuasaan mengandung nilai-nilai yang dangkal tetapi tentulah amat penting bagi kehidupan politik dan bersama manusia. Hal ini membuka peluang yang lebar untuk diserapi oleh nilai-nilai yang lebih dalam dan mendasar. Ideologi dapat mengambil peran didalamnya. Ideologi mestinya merupakan basis yang paling mendasar bagi sumber daya manusia dalam memunculkan gagasan-gagasan sumber daya ekonomi dan sumber daya-sumber daya lainnya dengan penggunaan kekuasaan dan topangan alam dan teknologi bagi pemenuhan kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa dan negara.

Politik tidak boleh terjebak dalam memahami rakyat sebagai suatu kelompok sosial tertentu, walaupun secara tidak terelakkan rakyat itu terdiri ari kelompok-kelompok sosial. Oleh karena itu untuk menghindari pemahaman yang sesat dan parsial tentang rakyat, maka rakyat adalah keseluruhan inividu dan kelompok sosial sebagai warga negara yang berada dalam wilayah suatu negara dan luar negara itu. Jadi, Politikus sebagai wakil rakyat bukanlah wakil dari kelompok sosial tertentu, tapi wakil keseluruhan kelompok sosial itu dalam suatu negara. Politikus dapat saja memperjuangkan suatu kelompok sosial termi kebaikan, kemanfaatan, kemajuan tentu dan kesejahteraan seluruh kelompok sosial dan individu yang disebut rakyat dan pada saat yang sama juga siap memperjuangkan hak kelompok sosial lainnya demi rakyat itu sendiri.

II.

 Politik itu bekerja dalam masyarakat dan masyarakat itu suatu kompleksitas hubungan kepentingan dan nilai-nilai yang saling pengaruh mempengaruhi antara individu dengan individu lainnya, individu dengan kelompok, individu dengan institusi, serta institusi dengan institusi. Institusi yang besar tiada lain adalah negara, didalamnya (masyarakat) tindakan-tindakan, kebijakan-kebijakan dan program-program diwujudkan. Partai politik ialah kelompok sosial dan institusi sekaligus yang terdiri dari individu–individu sebagai anggotanya yang terikat pada ideologi, norma, sistem dan program-programnya. Dengan sendirinya hal-hal yang terjadi dalam suatu masyarakat. Bangsa dan negara akan mempengaruhi masyarakat politik itu sendiri. Salah satunya melalui gagasan yang kondusif.

Dalam hubungan antar manusia, individu, kelompok dan institusi, hanya ada dua modus yakni Konflik dan Harmoni. Didalamnya politik bekerja. Harmoni mengambil dua bentuk, yakni kerjasama dan persaingan. Dalam kerjasam dan persaingan, konflik dapat saja muncul. Untuk meredam konflik dan melanggengkan harmoni, maka penyelesaian konflik itu dapat ditempuh dengan empat cara, yakni cara yang mengedepankan dialog, dan cara-cara damai, melalui jalur hukum dan cara kekerasan dengan mengedepankan kekuasaan dan senjata. Namun suatu hal yang disadari betul bahwa konflik yang mengedepankan penyelesaian melalui kekerasan akan mengakibatkan mengalami kehidupan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu masyarakat. Oleh karena itulah penyelesaian konflik dengan kekersan sebaiknya dihindarkan, kecuali kekerasan merupakan satu-satunya pilihan yang tidak dihindarkan.

 Politik bergerak dalam tatanan konflik dan harmoni ini, menghindari suatu komunikasi politik dalam upaya mengembangkan, memajukan masyarakat, bangsa ataupun dalam mengembangkan peradaban dan kebudayaan politikus, sebaiknya memahami sebab-sebab dan akar-akar konflik, untuk dapat mengantisipasi dan memberikan solusi penyelesaian yang tepat dalam upaya menjaga kelangsungan harmoni bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan umat manusia.

III.

 Suatu masyarakat bangsa hidup dalam suatu institusi besar yang disebut negara. Negara adalah bentuk institusi politik. Dikarenakan negara merupakan institusi politik, negara itu suatu institusi yang dibuat, diciptakan oleh para *Founding Fathers* dengan dukungan suatu masyarakat bangsa yang disebut rakyat. Rakyat beserta para *Founding Fathers* itu adalah warga negara awal dari negara yang didirikan itu. Oleh karena itulah memahami gagasan para *Founding Fathers* sebagai negarawan adalah suatu jalan praktis bagi politikus yang berkembang dalam negara itu.

 Suekarno sebagai salah satu *founding fathers* dan raksasa politik Indonesia selain Hatta, Syahrir dan Tan Malaka, mengibaratkan negara itu seperti rumah yang besar, yang di huni oleh berbagai kelompok sosial, kepercayaan, pemikiran dan kebudayaan yang selama ini di kenal dalam istilah masyarakat yang bersifat plural dan multikultural, yang dilandasi oleh suatu Idiologi yang di sebut Pancasila. Akar-akar dari Pancasila itu tidak lain ialah Agama, kepercayaan, adat istiadat, kebudayaan dan sejarah bangsa itu sendiri, oleh karena itu negara dapat di sketsakan sebagai berikut: republik

* Presidensil Negara federasi

**Rakyat**

* Parlement kerajaan
* Campuran pemerintah wilayah darat
* Legislatif sistem hukum sistem hukum laut

Sisitem politik sistem politik Udara

* Eksekutif
* Yudikatif

**Partai politik /Polisi**

**Masyarakat plural an multicultural**

**ORMAS**

Sistem politik

Sistem hukum

**Sistem politik**

**Sistem hukum**

**Agama, kepercayaa, adat istiadat, kebudayaan dan sejarah perjuangan bangsa**

**Ideologi**

Substansi

Kebijakan

Regulasi

Status/peran

Sistem hukum

Struktur

Institusi

Sistem politik

Gagasan

Kultur

Cara berfikir

Cara bersikap

 pemerintah

Negara Konvensional negara udara

Wilayah laut

Pengakuan negara lain danau pemerintah

pemerintah

Negara inkonvensional rakyat udara

wilayah laut

pengakuan negara lain danau

sistem hukum masyarakat

ideologi

Ideologi negara dalam konteks NKRI adalah pancasila yang akar-akarnya terdapat dalam agama, kepercayaan, adat, kebudayaan dan sejarah bangsa Indonesia.

Negara jelas memiliki dua sektor yaitu sektor pemerintahan dan sektor masyarakat. Pusat kegiatan masyarakat adalah ekonomi dan kebudayaan. Kebudayaan tidak dalam arti yang sempit tetapi dalam arti yang luas, politik pendidikan, sosial, keagamaan, alam-pengetahuaan, seni kegiatan olahraga. Kegiatanyang demikian itu akan mempengaruhi sektor pemerintahan.

Dalam pengertian konvensional, negara itu hanya meliputi tiga wilayah; yaitu laut, udara dan darat yang diperankan oleh tentara dan organisasi ketentaraan. Sedangkan dalam pengertian inkonvensional, negara itu meliputi empat wilayah dan wilayah keempat itu adalah masyarakat, yang dalam menjaga ketertiban dan keamanan serta menegakkan hukum, partai juga berperan di wilayah keempat ini dalam upaya mengelola dan menyerap aspirasi, merekrut kader-kader, menciptakan basis-basis politik dan melakukan amal-amal soial dan politik dan sebagainya sesuai dengan fungsinya. Kader-kader inilah yang digodok oleh parta-partai politik untuk menjadi calon-calon negarawan yang kelak untuk ditempatkan pada posisi-posisi negara melalui pemilu yang dilakukan secara periodik.

IV.

Negara sebagai suatu institusi politik diresapi dan diliputi oleh kekuasaan. Kekuasaan adalah daya-daya yang mempengaruhi orang secara sukarela ataupun terpaksa, sadar ataupun tidak sadar kearah tujuan-tujuan yang di kehendaki dari kekuasaan itu. Dikarenakan kekuasaan ini meliputi dan meresapi negara dan semua orang, maka konsentrasi dan kadarnya pada sektor-sektor negara dan orang perorangan tidaklah sama ataupun masyarakat ataupun warga negara ataupun rakyat. Persoalannya dari manakah sumbernya kekuasaan yang meresapi rakyat dan negara itu?

Secara *perennial* atau *azali* atau awal mula yang abadi sumbernya adalah Tuhan Sang Pencipta. Oleh karena itulah kekuasaan itu juga sifat Tuhan. Namun diantara ciptaan Tuhan yang unik yang dapat menyerap dan mengaktualisasikan sifat-sifat Tuhan adalah manusia sebagai ciptaan Tuhan. Dengan senirinya konsentrasi dan kadar yang besar dari kekuasaan terdapat pada manusia itu sendiri. Manusia itu berkumpul menjadi satu kesatuan diwilayah tertentu disebut sebagai rakyat. Ini adalah suatu tesis demokrasi, karena negara itu dibuat oleh rakyat sebagai produk rakyat, sebagai sarana untuk mengatur dan mencapai tujuan kehidupan bersama mereka. Itulah sebabnya negara itu tidak dapat berhenti sebagai institusi politiksaja tetapi sekaligus sebagai institusi sosial, ekonomi, hukum dan budaya. Adagium dalam demokrasi yang menyatakan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan secara implisit menunjukkan bahwa sumber *perennial* kekuasaan itu sesunggunya adalah Tuhan Yang Maha diatas Maha. Dengan begitu kekeuasaan itu memiliki alurnya, sumber *perennial*nya Tuhan, mengalir pada manusia sebagai rakyat dan menjadi sumber *empiris*nya dan selanjutnya menybar pada negara.

Dalam negara kekuasaan itu lembaga menjadi dua, yakni; yang satu disebut sebagai kekuasaan saja, dan yang lain disebut sebagai wewenang. Kekuasaan itu meliputi sektor formal dan informal. Dan tatkala masuk ke sektor formal dalam suatu negara, maka kekuasaan itu mengambil bentuk sebagai wewenang. Wewenang adalah kekuasaan yang didasarkan hukum dan dibatasi hukum. Tatkala partai politik yang menggodok kadernya sebagai calon-calon negarawan dan berhasil menghantarkan dan memasukkan kader-kadernya ke sektor negara melalui proses politik yang disebut pemilu maka kader-kader partai yang awalnya adalah partisan berubah menjadi negarawan yang memiliki wewenang dalam segala tingkatannya, sebagai suatu kekuasaan yang berhak mengatur sektor negara dan sektor masyarakat serta menjadika program-program partai menjadi program negara untuk diwujudkan demi kepentingan rakyat, bangsa negara itu sendiri. Dengan sendirinya terlihat bahwa kekuasaan yang berupa wewenang itu merupakan amanah Tuhan dan amanah rakyat sekaligus yang mesti digunakanemi kepentingan rakyat dan negara.

V.

 Bagaimana awalnya negara dapat mempunyai hak-hak dan sekaligus kewajiban dalam memenuhi hak-hak rakyat itu?

Hal yang demikian itu dapat dijelaskan dalam teori *pe*-janjian masyarakat, sebagi berikut; Menurut pembawaannya, hakekat manusia itu adalah mahluk yang bebas dan merdeka, melalui kemampuan orang perseorangannya hidup secara alamiah berkelompok. Itulah sebabnya manusia itu disebut juga mahluk sosial, mahluk yang tidak dapat hidup kecuali bersama orang lain. Manusia baik sebagai individu maupun kelompok memilki pengetahuan dan pendukung hak-hak dan kewajiban. Manusia yang demikian itu, seiring dengan perjalanan waktu tidak puas dalam kehidupan yang alamiah itu, karena mereka ingin memaksimalkan potensi-potensi mereka demi kehidupan perseorangan dan bersama dan mencegah hal-hal yang negatif yakni dapat menghancurkan potensi-potensi itu, mereka akhirnaya membentuk negara. Negara tentu terus mengembangkan diri dengan sejalan perkembangan sejarah, dan pada setiap bangsa mengambil jalan dengan tujuan yang sama, yakni membntuk negara. Setelah membentuk negara merdeka sebagai suatu kelompok, masyarakat bangsa lalu berhadapan dengan negara dan secara bersama pula membentuk suatu perjanjian. Untuk mengatur dan memenuhi kehidupan bersama mereka dengan meyerahkan sebagian hak yang mereka miliki pada negara. Hak-hak yang demikian itu disandang dan dilaksanakan oleh orang-orang yang mereka pilih sendiri untuk mengurus negara. Hak-hak yang demikian itu juga menimbulkan kewjiban-kewajiban pada negara untuk memenuhi hak-hak bagi kehidupan bersama-sama sebagai masyarakat dan atau rakyat. Dengan demikian manusiapun hidup dalam kekuasaan negara yang diselenggarakan oleh suatu pemerintahan yang berdaulat. Akhirnya orang-orang yang mengurus pemerintahan itu dipilih oleh rakyat secara periodik yang sekarang dikenal sebagai proses politik untuk mengurus baik kepentingan rakyat maupun kepentingan negara. Rakyat tiada lain adalah keseluruhan orang-orang dan kelompok-kelompok sosial yang mendiami wilayah negaranya dan negara lain. Negara tiada lain adalah institusi sosial, politik, ekonomi/budaya dan hukum ciptaan manusia demi untuk memenuhi kehidupan bersama mereka sebagai mahluk sosial.

IV.

 Darimana sesungguhnya sumber hak dan kewajiban yang terdapat dan dimiliki oleh manusia itu?

Dan apakah sesungguhnya hak itu?

 Hak itu, dapat dipahami sebagai kepentingan yang dilindungi dan diakui hukum, yang memberikan pada pemilik dan pendukung hak itu kebebasan dan kekuasaan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan, menuntut atau tidak menuntut, memberikan atau tidak memberikan, dalam batas-batas yang dibenarkan hukum.

 Sedangkan kewajiban tiada lain adalah perintah-perintah dari hukum, kode etik dan hati nurani untuk melaksanakan sesuatu dan bila tidak dilaksanakan yang muncul adalah kesalahan. Dalam kewajiban tiada kebebasan untuk memilih yang ada hanya keharusan untuk melaksanaka. Oleh karena itu terkandung konsekuensi hukum dan moral serta sosial.

 Hak dan kewajiban ini memiliki jenis dan sumbernya;

1. Hak dan kewajiban yang terberikan yang sumbernya dari Tuhan, terdapat dalam agama dan HAM.
2. Hak dan kewajiban yang muncul atau yang bersumber karena interaksi sosial.

Interaksi sosial ini meliputi; interaksi antara inividu dengan individu, seperti; sewa menyewa, perkawinan. Interaksi antara individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, individu atau kelompok dengan institusi, dan institusi dengan institusi. Hak-hak dan kewajiban yang demikian sebaiknya bersifat tertulis dan sah, dengan begitu ia dapat diakui dan dilindungi hukum. Hak dan kewajiban yang muncul dari interaksi sosial ini, sebagaimana juga menjadi bagian dari HAM. Hak-hak yang muncul karena interaksi muncul sebagian dengan perkembangan dan bidang-bidang kehidupan manusia, seperti ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan dan seterusnya.

VII.

 Negara, kekuasaan dan hak dan kewajiban menghendaki dan meniscayakan pemimpin dan kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan berimpit dengan pengertian kekuasaan, tetapi suatu kekuasaan yang diefektifkan melalui sikap-sikap, perbuatan-perbuatan, dan gagasan-gagasan ataupun keputusan-keputusan orang-orang yang disebut dan dianggap dan dipandang pemimpin. Pemimpin kadang begitu saja disamakan dengan elit. Keduanya memiliki kaitan pemimpin jelas adalah elit, tetapi elit belum tentu pemimpin, walaupun elit juga memiliki pendukung-pendukungnya.

 Pemimpin adalah mereka yang meletakkan kepemimpinannya dalm kepentingan rakyat dan bersama-sama dengan rakyat mendapat tujuan-tujuannya dan pemimpin tidak akan memanipulasi rakyat demi tujuan rakyat sendiri. ataupun kepenangan pemimpin itu tidak teralisasi atau terasing dari kepentingan rakyat. Kepentingan pemimpinan itu tidak berada diatas, di luar ataupun dibelakang kepentingan rakyat melainkan didalamnya. Hal inilah yang membedakan pemimpin dengan elit itu. Tentulah seorang pemimpin itu memiliki gaya yang berbeda-beda dalam menjalankan kepemimpinannya. Hal adalah lumrah dan bahkan alamiah. Karena situasi dan kondisi yang dihadapi oleh seorang pemimpin tidaklah senantiasa sama, sepanjang hal-hal yang demikian tidaklah menghalangi keefektifan kepemimpinanya.

 Sedangkan elit kepentingannya tidaklah berada dalam kepentingan rakyat, tetapi dapat sama dengan kepentingan rakyat. Kepentingan elit itu dapat berada diluar, diatas, dibelakang dan didalam kepentingan rakyat. Tatkala kepentingannya sejalan dengan kepentingan rakyat, maka ia pun dapat bersimpang jalan dengan rakyat, bahkan ia tidak akan segan memanipulasi kepentingan rakyat demi kepentingannya.

 Pemimpin itu bukan hanya orang-orang yang mampu menggerakkan rakyat dan mempengaruhi dan memotivasi rakyat untuk mencapai tujuan-tujuannya yang sekaligus merupakan tujuan dari rakyat itu tetapi sekaligus merupakan orang-orang yang berani mengambil keputusan dan memperjuangkan keputusan itu demi kepentingan rakyat itu sendiri. seorang pemimpin jelaslah orang yang pribadi dalam kapasitasnya sebagai seorang manusia serta berpengetahuan yang laur agar memiliki kemampuan untuk dapat berfikir strategi serta kemampuan untuk mengambil keputusan-keputusan yang bersifat strategi yakni pemikiran dan keputusan yang menyangkut kepentingan umum, orang banyak, rakyat, bangsa dan negara bukan kepentingan pribadi dan kelompok serta memiliki integritas dengan tidak mengorbankan kepentingan rakyat, bangsa ataupun negara. Dan kemampuan untuk melakukan *problemb solving* dalam tingkatannya. Selain dari itu, ia juga mesti memiliki kemampuan *self console* terhaap kekuasaan, agar kekuasaan tidak menelan dirinya sendiri. Dalil Lord Acton tentang kekuasaan yang menyatakan *Power Trend* *to Corrupt Absolute Power Corrupts Absolutely* menunjukkan kekuasaan dapat menelan seorang pemimpin itu sendiri, dalam taraf yang demikian menunjukkan kepentingan pemimpin itu tidak berada dalam kepentingan rakyat tetapi tidak terasing dari kepentingan rakyat dan ia pun berubah menjadi elit, dan bahkan dapat lebih dari seorang tiran.

 Secara internal, kekuasaan yang berada pada seorang pemimpin itu dapat di kontrol oleh diri, pemimpin itu sendiri dan berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri. oleh karena itu, seorang pemimpin itu mesti memiliki iman yang hidup, tumbuh dan berkembang dari keyakinan dan sepenuhnya sadar pada Tuhan yang Maha Esa. Lao Tse, Einstein, Newton dan yang lainnya untuk menyebut beberapa nama selain para Nabi. Pada iman yang demikian itulah akar dari hati nurani dan kesadaran moral yang kuat tumbuh dan mekar dalam dirinya dan sekaligus sebagai sarana paling ampuh untuk mengontrol kekuasaan itu dalam dirinya sendiri. secara eksternal, kontrol kekuasaan itu dapat dilakukan oleh pemimpin dengan memahami dan memperhatikan hukum, batas-batas kewenangan dari kekuasaan itu dan suara-suara para cendikiawan dan rakyat yang mengontrol kekuasaannya. Dengan begitu, kekuasaan dan pemimpin akan tetap berada dalam jalur kepentingan rakyat, bangsa dan negara dan tidak akan menelan dan menguasai pemimpin itu sendiri.

 Selain dari itu, pemimpin itu juga tidak boleh melupakan ataupun mengabaikan distribusi kekuasaan pada bawahannya atau distribusi dari kekuasaan-kekuasaan yang berada di bawah kekuasaannya serta kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan dan keputusannya, agar pelaksanaan dan penggunaan kekuasaan-kekuasaan dan kebijakan serta keputusannya itu tetap berada pada jalur kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

 Pemimpin itu hendaknya faham tentang kenyataan-kenyataan yang dapat dijadikan dali-dalil baginya untuk mengambil keputusan dan penggunaan kekuasaan untuk kepentingan rakyat. *Pertama,* dalam kenyataan-kenyataan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan dalam berbagai skala tingkatannya dalam kenyataan alam semesta hal-hal yang sifatnya fisik ada yang terlihat, yang dengan mudah disaksikan melalui panca indera dan yang tidak terlihat bendanya tetapi ada gejala atau fenomenanya, yakni; kenyataan-kenyataan *sub-atomik*, yang dapat dikonstruksi oleh akal budi. Dalam kenyataan sosial kemasyarakatan, ada pula terlihat seprti: perbuatan-perbuatan manusia ataupun aktivitas-aktivitas manusia, tetapi ada yang pula yang tidak terlihat yakni nilai-nilai tetapi dapat dikonstruksikan melalui akal budi, misalnya dalam pembagian barang atau jasa diterima oleh orang-orang yang tidak berhak yang sama sekali tidak memnuhi kewaiban. Akan timbul reaksi dalam masyarakat. akal budi mengkonstruksinya bahwa munculnya nilai ketidakadilan dalam hal itu. Akan tetapi bila sebaliknya yang dilakukan maka timbul pula reaksi yang berupa apresiasi. Dalam hal itu dapat dikonstruksikan nilai keadilan terpenuhi. Adil itu terpenuhi hak dan kewajiban. Demikian juga dalam setiap kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pasti ada hal yang terlihat dan yang tidak terlihat dalam bentuk dan tingkatannya yang berbeda-beda. Pemahaman tentang hal ini membuat pemimpin dapat mengambil keputusan yang tepat dan bermanfaat bagi banyak orang hal-hal yang nyata bukan atas dasar yang tidak nyata.

Kedua, pemimpin itu, mesti sadar dan faham dalam kenyataan sosial itu setiap orang tidak dapat lepas dari penilaian, ini tentu melibatkan penyetahuan dalam tingkatannya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemimpin mesti memiliki dalil terhadap dirinya, sebagai berikut: soal menilai diri serahkan pada orang lain, tetapi soal mengetahui diri saya, saya mesti lebih tahu dari orang lain walaupun dalam hal-hal tertentu dibutuhkan penjelasan dari orang lain. Dengan begitu, pemimpin itu dapat mempertahankan otonominya dalam membuat keputusan dan sekaligus terbuka dengan pandangan-pandangan dari berbagi pihak. Pemimpin yang demikian itu akan berlapang dada dan tidak akan panik ataupun marah serta benci ataupun alergi pada kritik. Akan tetapi, dapat mengambil manfaat dari kritik baik untuk dirinya ataupun untuk orang-orang yang dipimpinnya atau rakyat. Diri ini dapat diperluas terhadap hal-hal ataupun kasus-kasus dimana ia dituntut untuk mengambil keputusan.

*Ketiga*, pernyataan mulailah dari diri sendiri. hal ini memberikan kesempatan bagi seorang pemimpin menaikkan kualitas kepemimpinannya melalui pengalaman-penglaman yang nyata. Dengan sendirinya ucapan dan perbuatan dapat memberikan inspirasi, motivasi dan kepercayaan dan teladan bagi banyak orang, sehingga akan mendorong terjadinya peningkatan kualitas kehidupan individu dan sosial. Mulai dari dirinya sendirinya juga dapat diaplikasikan dalam kasus-kasus khusus yang menuntutnya mengambil keputusan yang tepat dalam kepentingan dan menyangkut hidup orang banyak.

*Keempat*, cara berfikir induksi dan deduksi, merupakan suatu cara berfikir ilmiah yang amat membantu dalam membuat keputusan yang tepat dan sepenuhnya dapat dipertanggung jawabkan dalam kaitan kasus dan masalah untuk kepentingan hidup orang banyak.

Namun suatu hal yang mesti difahami benar oleh para pemimpin yang bergerak dalam bidang persepsi tidak boleh terperangkap dalam batas-batas kekuasaan saja melainkan ia mesti pula memiliki persepsi ekonomi, berbeda dengan ilmu ekonomi, pada yang pertama bisa dimiliki oleh siapa saja, tetapi ilmu ekonomi bagian yang mesti dipunyai oleh para profesional dibidang ekonomi. Tentu bila pemimpin itu memiliki ilmu ekonomi dalam menopang pandangan-pandangan politiknya, hal yang demikian itu tentu sangatlah baik. Pada gilirannya pemimpin yang memiliki persepsi ekonomi dan kekuasaan itu mesti pula menghayati secara mendalam nilai-nilai ideologi yang telah membentuk masyarakat, bangsa dan negaranya.

VIII.

 Inti kebudayaan dan substansi ataupun erensi kebudayaan adalah nilai-nilai. Dan nilai-nilai terbaiknya dapat dirumuskan dalam bentuk ideologi yang digunakan suatu masyarakat, bangsa sebagai landasan membangun diri dan negaranya. Itulah sebabnya para budayawan dan cendikiawan menyatakan bahwa untuk membangun suatu bangsa yang maju dan mandiri, serta masyarakat, bansa itu mesti memiliki suatu landasan kebudayaann, sebagai sumber energi mental dan spiritulnya yang secara terus menerus memberikan pada masyarakat-bangsa itu, suatu dorongan dan motivasi untuk terus berbuat dan berkarya. Bagi bangsa Indonesia yang plural dan multikultural landasan yang demikian itu disebut pancasila.

 Dalam ideologi pancasila itu terdapat sumber energi yang tidak dapat aus. Tatkala suatu kelompok sosial. seseoran menyandarkan dan melandaskan hiup dan kehidupannya pada sumber energi ini, maka dalam perjuangan hidupnya, seseorang, kelompok sosial, masyarakat ataupun rakyat suatu bangsa dapat senantiasa terbaharui energi mental, spiritual dan moralnya untuk mencapai tujuan-tujuan hidup dan cita-citanya, sebagai individu, kelompok, bangsa dan umt manusia.

Sumber energi spiritual, mental dan moral tidak habis-habisnya dan tidak dapat aus serta meresapi alam semesta itu tidak lain adalah sumber dari Allah SWT atau Tuhan Yang Maha Esa. Setiap orang, kelompok sosial, masyarakat, bangsa ataupun umat manusia yang sepenuh hati dan sadar menyandarkan atau melandaskan hidup dan kehidupan pada sumber energi ini, dapat senantiasa memperbaharui energi mental dan spiritual untuk mencapai cita-cita bangsanya.

Syukurlah bangsa Indonesia tidak mengambil basis material sebagai sumber energi mental, spiritual dan moralnya suatu basis energi yang dapat aus yang tidak bertahan dalam waktu. Uni Soviet yang mengambil basis material sebagai sumber energi spiritual, mental dan moralnya dalam membangun bangsa dan negara hanya bertahan selama kurang lebih 70 (tujuh puluh) tahun saja. Melalui dua kata keterbukaan dan demokrasi dari Gorbachev negara bangsa yang dibangun atas dasar yang demikian itupun hancur berkeping-keping. Hal yang demikian juga diikuti ole negara Eropa Timur yang menginduk pada Uni Soviet. Ketidak mampuan ideologi melanjutkan perjalanan sejarah jangka panjang dalam membangun bangsa dan negara oleh Arnold Joseph Toynbee, pemikir sejarah yang terkemuka dalam *magnum opusnya study of history.*

Namun tentu harus disadari perbedaan ideologi dalam pengertian Destat dari Tracy dan pengertian ideologi dalam panangan Karl Marx atau dapat disebut juga sebagai pandangan ideologi konvensional dan inkonvensional, ideologi tidak lain merupakan seperangkat gagasan, nilai-nilai yang menyembunyikan kenyataan yang sesungguhnya, yang digunakan kelompok yang berkuasa demi melanggengkan kepentingan dan kekuasaannya. Pengertian ideologi yang pertama merupakan landasan bagi bangunan bangsa dan negara Indonesia. Pengertian ideologi yang kedua dapat digunakan oleh para penyelenggara negara sebagai kelas yang berkuasa untuk terus melanggenggkan posisi, kepentingan dan kekuasaanya dengan terus melakukan disimulasi dan distorsi terhadap kenyataan. Dengan sendirinya kontrol terhadap kekuasaan dan penggunaan kekuasaaan menjadi suatu niscaya, bila suatu bangsa ingin tetap setia terhadap cita-cita dan ideologi yang dipilihnya sendiri dalam membangun dirinya.

Ideologi bangsa Indonesia itu berakar dalam agama, kepercayaan, adat istiadat dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu pula, keramat dalamnya suatu ingatan sejarah atau *historical memory* dan kesadaran sejarah atau *historical conciousnes.* Salah satu ingatan sejarah adalah bangsa Indonesia yang terbentuk melalui Sumpah Pemuda tahun 1928 itu, pernah dijajah oleh bangsa Belanda selama ratusan tahun melaui politik *Devide et empera* nya atau pecah belah dan dikuasi. Bila ingin sejarah politik Belanda yang demikian itu dijadikan kesaaran sejarah maka yang muncul dalam kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara adalah konflik antar suku, antar agama, antar partai politik, antar kampus, antar pengurus sepakbola dan sebagainya, sehingga mengauskan energi positif masyarakat, bangsa untuk membangun dan mengembangkan dirinya. Kesdaran sejarah yang demikian itu sekedar meneruskan saja ingatan sejarah politik penjajah Belanda masa lampu itu. Akan tetapi bila ingatan sejarah justru pada sumpah pemuda dan sejarah perjuangan melawan bangsa Belanda, kesadaran sejarah yang mestinya muncul pada setiap anak bangsa Indonesia adalah meniadakan, meredam setiap konflik yang mengauskan energi positif bangsa, semakin memperkukuh jatidiri sebagai bangsa dan terus melakukan perjuangan terhadap penjajah baru, seperti kemiskinan, keterbelakangan, ketertinggalan dalam biang-bidang pendidikan, ekonomi, ilmu pengetahuan, olahraga, kesehatan dan lainnya. Kesadaran sejarah yang demikian itu berhasil mengambil nilai inti dari sumpah pemuda dan perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri.